



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Jalur Sutera Maritim sebagai Pemenuhan Strategi Ekonomi Xi Jinping**

Skripsi

Oleh

Cardita Caturwidiasta Prawira

2013330152

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Cardita Caturwidiasta Prawira  
Nomor Pokok : 2013330152  
Judul : Jalur Sutera Maritim sebagai Pemenuhan Strategi  
Ekonomi Xi Jinping



Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 06 Juli 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A. :

**Sekretaris**

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. :

**Anggota**

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. :

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cardita Caturwidiasta Prawira

NPM : 2013330152

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Jalur Sutera Maritim sebagai Pemenuhan Strategi  
Ekonomi Xi Jinping

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Cardita Caturwidiasta Prawira

## ABSTRAK

Nama : Cardita Caturwidiasta Prawira

NPM : 2013330152

Judul : Jalur Sutera Maritim sebagai Pemenuhan Strategi Ekonomi Xi Jinping

---

Kurangnya pasokan energi serta ketidakmerataan ekonomi menjadi isu utama dalam strategi ekonomi Tiongkok saat ini. Akses energi yang andal diperlukan untuk mendukung keberlangsungan industrialisasi serta pembangunan wilayah barat yang masih terbelakang dalam hal ekonomi. Jalur Sutera Maritim, yang diinisiatifkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013, menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasokan energi yang andal dan mendorong pembangunan ekonomi daerah barat Tiongkok.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori *developmental state* yang menjelaskan pengelolaan ekonomi dan politik negara berkembang seperti Tiongkok, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama. Teori kedua, *energy security*, menjelaskan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mencapai keamanan energi. Analisis strategi ekonomi Tiongkok dan inisiatif Jalur Sutera Maritim ini dibatasi sejak adanya industrialisasi tahun 1949 hingga akhir 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif Jalur Sutera Maritim, merupakan salah satu bentuk politik luar negeri Tiongkok yang ditujukan untuk memenuhi strategi ekonomi Xi Jinping. Strategi ekonomi tersebut adalah memperoleh pasokan energi yang andal dan mengembangkan perekonomian di daerah barat Tiongkok sehingga pada akhirnya dapat menopang keberlanjutan industrialisasi dan mencapai pemerataan ekonomi nasional.

Kata kunci: keamanan energi, industrialisasi, wilayah barat Tiongkok, Jalur Sutera Maritim.

**ABSTRACT**

*Name : Cardita Caturwidiasta Prawira*

*NPM : 2013330152*

*Title : Maritime Silk Road as Fulfillment of Xi Jinping Economic Strategy*

---

*Lack of sustainable energy supply and economic inequality are the main focus of China. Reliable energy access is needed to support the sustainability of industrialization as well as the development of the economically backward western region. Maritime Silk Road is one of the solutions to secure reliable energy supply and encourage economic development of China's western region.*

*This analysis is carried out using the developmental state theory which explains the economic and political management of developing country such as China, by placing the state as the central actor. The second theory, energy security, describes the elements needed to achieve energy security. This analysis of Maritime Silk Road initiative is limited in the year of 2013-2015.*

*The result of this study indicates that the initiative of Maritime Silk Road, is the fulfillment of Xi Jinping's economic strategy to secure reliable energy supply and to develop the economy of China's western region to sustain China's industrialization .*

*Keywords: energy security, industrialization, western region of China, Maritime Silk Road*

## KATA PENGANTAR

Penelitian ini menjelaskan tentang upaya pemerintahan Xi Jinping mengatasi permasalahan ekonomi Tiongkok seperti kurangnya pasokan energi yang andal serta ketidakmerataan perekonomian. Oleh karena itu pemerintahan Xi Jinping muncul dengan inisiatif Jalur Sutera Maritim. Melalui strategi ini, Xi Jinping berupaya mengamankan pasokan energi, yang dialirkan melalui daerah barat, bagi industrialisasi di daerah pesisir timur Tiongkok. Di saat yang sama, inisiatif ini juga membangkitkan perekonomian wilayah barat melalui industri energi dan industri bahan baku. Jalur Sutera Maritim, yang merupakan bagian dari strategi *One Belt One Road*, merupakan ambisi terbaru dan terbesar bagi Tiongkok di abad 21. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menganalisis signifikansi inisiatif ini dalam strategi ekonomi pemerintahan Xi Jinping.

Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan nilai tugas akhir bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) yang menjadi hasil dari proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpar. Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya studi ilmu Hubungan Internasional terutama dalam topik ekonomi politik internasional Tiongkok. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis memohon maaf atas kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Segala bentuk kritik, saran, dan pendapat yang konstruktif sangat diharapkan demi penelitian yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini terutama dosen pembimbing, Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono.

Bandung, 1 Agustus 2017

Cardita Caturwidiasta Prawira

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Sang Pencipta Kehidupan. Saya bersyukur telah diberi kesempatan untuk hidup, mengenyam pendidikan, dan memiliki sedikit pengetahuan tentang hidup. Untuk alam, hujan, kabut, anak-anak, ibu, pengetahuan, kasih sayang, orang-orang yang saya sebutkan di bawah, dan segalanya, saya ucapkan terimakasih kepada-Nya.

Kepada Tuti Kustiana, pemberi kehidupan yang mengawasi kehidupan saya dari atas sana. Hadi Prawira, guru pertama dan ayah terbaik bagi saya. Orca Ekawidiasta dan Valisneria Dwiwidiasta Prawira, kakak-kakak yang menjadi contoh, aspirasi, pemberi nasihat serta dorongan. Salvinia Triwidiasta yang merupakan rival, teman bermain, kakak, ibu, namun selamanya sahabat sejati yang paling mengerti saya. Semua, keluarga yang berarti hingga akhir hayat saya.

Kepada dosen pembimbing saya, Mas Irawan, yang entah mengapa tetap sabar dalam memberikan bimbingan selama 1 tahun proses penulisan skripsi ini. Nasihat dan semangat yang beliau berikan dalam penulisan skripsi, karir, dan hidup tidak akan pernah saya lupakan.

Kepada Herdiani Dewi, Tamara Septiani Darmadi, Clara Santi Rejeki, Adella Anna Pratiwi. Perempuan-perempuan cerdas, hebat, dan kuat yang selama hampir 4 tahun telah memberikan nasihat, inspirasi, dorongan, semangat, petualangan, tawa, kekhawatiran, kasih sayang, dan saya bangga menyebut mereka sebagai sahabat.

Kepada Ibu Kristining Seva, S.S., M.PD. yang menjadi tempat saya berkeluh kesah tentang kuliah dan kehidupan saya sebagai mahasiswi. Ibu Nastiti Anggarini W., S.PSI. dan Mas Engger, S.PSI yang ketenangan kantornya selalu saya ganggu untuk “konsultasi”. Pihak PPK, BKA Unpar, dan Bapak Frank Landsman, MA yang memberi saya kesempatan untuk membaktikan diri saya mengajar mahasiswa-mahasiswi dari Nias dan Papua.

Kepada Joana Audry, teman seperjuangan yang tanpa kehadirannya di Starbucks atau Cawit, saya tidak yakin dapat memiliki niat untuk menyelesaikan skripsi ini. Agustian Chuagestu, teman berbincang tentang pahlawan super, Marvel, DC dan lain-lain. Hendry, Yovan, Mutia, serta semua teman-teman ISC yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu di sini.

Kepada Valentine Archie, Marissa Sanjaya, Raya Kathina, Milzam, Senaldo, Rianky, dan semua teman-teman IGREEN PROJECT AIESEC atas persahabatan, pelajaran tentang hidup dan berorganisasi, serta kenangan yang diberikan.

Kepada teman-teman di Kakak Asuh FISIP Unpar dan Warta Himahi untuk pelajaran berorganisasi dan kesempatan bagi saya untuk menemukan *passion* saya akan anak-anak, edukasi, dan jurnalisme.

Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah Jepang, dan program JENESYS (Japan Exchange Network for Students and Youths) Media Batch 11 tahun 2015 yang menerbangkan saya dan keempat sahabat saya untuk menginjakkan kaki di Tokyo dan Ehime dan mempertemukan saya dengan keluarga Takeyasu yang menerima saya dengan hangat di Matsuyama.

Untuk Bandung dan Kampus 3, yang menjadi rumah bagi saya dan teman-teman selama 3,5 atau 4 tahun hidup kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Banyak perasaan bercampur aduk selama saya berada di kota dan kampus ini, namun saya bangga dan senang untuk meninggalkan Bandung dan Kampus 3, akhirnya Sarjana Ilmu Politik.

Kepada Anda, para pembaca yang meluangkan waktu untuk membaca tulisan saya. Semoga apa yang saya tulis bermanfaat dan apabila Anda pun dalam proses penulisan skripsi, dalam tulisan ini saya sisipkan doa dan semangat untuk menyelesaikannya sebaik dan secepat mungkin. Keinginan untuk memperoleh informasi lebih jauh mengenai skripsi beserta bahan-bahan bacaannya dapat dikirim ke [prawiracardita@gmail.com](mailto:prawiracardita@gmail.com).

Bandung, 1 Agustus 2017

Cardita Caturwidiasta Prawira

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	3
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kajian Literatur .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	11
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.6.1. Metode Penelitian .....	20
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7. Sistematika Penyajian .....	21
<b>BAB 2 STRATEGI EKONOMI TIONGKOK.....</b>	<b>23</b>
2.1. Industrialisasi Tiongkok.....	23
2.1.1. Latar Belakang Industrialisasi 1949 – 1959.....	24
2.1.2. Persiapan Pra-Reformasi Ekonomi.....	25
2.1.3. Industri Tiongkok Pada Masa Reformasi 1978 – 1983 .....	30
2.1.4. Industri Tiongkok Paska Reformasi .....	35
2.1.5. Kontribusi Industri Terhadap Ekonomi .....	38
2.1.6. Permasalahan yang Timbul dari Industrialisasi.....	40

2.2.	<i>Western Development Strategy</i> .....	42
2.2.3.	Latar Belakang Strategi.....	42
2.2.4.	Profil Wilayah barat Tiongkok.....	43
2.2.5.	Tujuan Strategi .....	47
2.2.6.	Prioritas Pengembangan.....	47
2.2.7.	Mekanisme Pengembangan.....	48
2.2.8.	Karakteristik Pengembangan.....	49
BAB 3 JALUR SUTERA MARITIM.....		52
3.1.	Latar Belakang Inisiatif.....	52
3.2.	Cetak Biru Jalur Sutera Maritim.....	54
3.2.1.	Prinsip .....	56
3.2.2.	Prioritas Kerjasama.....	56
3.2.3.	Badan Pendukung Inisiatif .....	58
3.3.	Mekanisme Kerjasama.....	58
3.3.1.	Koridor Ekonomi Tiongkok – Pakistan .....	58
3.3.2.	Koridor Ekonomi Bangladesh – Tiongkok – India – Myanmar.....	60
3.4.	Progres Inisiatif .....	63
BAB 4 JALUR SUTERA MARITIM SEBAGAI PEMENUHAN STRATEGI EKONOMI XI JINPING.....		66
4.1	Pemenuhan Kebutuhan Energi bagi Industri Wilayah Timur .....	66
4.1.1	Proyek Myanmar .....	74
4.1.2	Proyek Pakistan .....	77
4.2	Peningkatan Kesejahteraan Wilayah Barat .....	80
4.2.1	Xinjiang.....	84
4.2.2	Yunnan.....	93
4.2.3	Tibet.....	106
BAB 5 KESIMPULAN.....		117
DAFTAR PUSTAKA .....		122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Poster pada Masa Keterbukaan dan Reformasi .....	28
Gambar 2.2 Kronologi Keterbukaan Tiongkok .....	29
Gambar 2.3 Pemetaan wilayah Tiongkok berdasarkan kekuatan ekonomi. ....	45
Gambar 3.1 Peta “String of Pearls” .....	53
Gambar 3.2 Peta “One Belt One Road” .....	55
Gambar 3.3 Peta buta koridor ekonomi Pakistan dan Tiongkok.....	59
Gambar 3.4 Koridor Ekonomi Bangladesh – Tiongkok – India – Myanmar (BCIM) .....	61
Gambar 4.1 GDP Tiongkok tahun 2011 – 2015.....	68
Gambar 4.2 Strategi Ports and Pipeline Tiongkok .....	73
Gambar 4.3 Jalur Pipa Sino-Myanmar.....	75
Gambar 4.4 Pelabuhan Gwadar, Pakistan .....	79
Gambar 4.5 Tempat Tinggal Tradisional Penduduk gurun di Xinjiang .....	85
Gambar 4.6 Pola pemukiman urban di Xinjiang .....	91
Gambar 4.7 Pegunungan Himalaya di Tibet .....	108
Gambar 4.8 Alam Tibet .....	111
Gambar 4.9 Biarawan penganut Buddhisme di Tibet.....	114
Gambar 4.10 Kompleks Istana Potala.....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel pertumbuhan sektoran dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional Tiongkok .....	34
Tabel 2.2 Tabel tingkat pertumbuhan output industri.....	38
Tabel 2.3 Tabel output industri berdasarkan wilayah.....	39
Tabel 2. 4 Pertumbuhan GDP per kapita di Empat Wilayah Tahun 1979 – 2005	41
Tabel 4. 5 <i>Gross Domestic Product</i> dalam RMB China’s Statistical Year Book 2014 – 2015 .....	81
Tabel 4. 6 GDP Perkapita Tiongkok tahun 2014 - 2015.....	82
Tabel 4.7 Komposisi GDP Yunnan .....	99
Tabel 4.8 Persentasi output industri bruto.....	99
Tabel 4.9 Kontribusi beberapa kelompok industry Yunnan terhadap output industri bruto .....	99
Tabel 4.10 Komposisi PDB Tibet.....	112
Tabel 4.11 Indikator ekonomi Tibet dan kontribusi beberapa kelompok industri terhadap output industri bruto .....	113

**DAFTAR SINGKATAN**

GDP	Gross Domestic Product
MDG	Millennium Development Goals
OBOR	One Belt One Road
AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
BRICS	Brazil Russia India China South Africa
SCO	Shanghai Cooperation Organisation
FDI	Foreign Direct Investment
GNP	Gross National Product
CPEC	China Pakistan Economic Product
BCIM	Bangladesh China India Myanmar
ASEAN	Association of South East Asia
CABIS	China ASEAN Business & Investment Summit
WTO	World Trade Organisation
CAEXPO	China ASEAN Expo
PDB	Produk Domestik Bruto
R&D	Research & Development
RMB	Renminbi
CNPC	China National Petroleum Corp
APEC	Asia Pasific Economic Cooperation

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di tahun 1978, Deng Xiaoping memulai perestrojkan ekonomi yang kemudian menjadi salah satu aspek utama dari reformasi Tiongkok. Sistem perekonomian sentral dimana pemerintah menjadi pusat kendali terhadap perencanaan berbagai bidang pembangunan ekonomi kemudian bergeser menjadi sistem perekonomian berbasis pasar (*market based economic system*). Sejak menerapkan reformasi ekonomi lebih dari 30 tahun yang lalu, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat. Dengan tingkat GDP (*Growth Domestic Product*) rata-rata 10% per tahunnya, pencapaian semua Millennium Development Goals (MDGs) oleh Tiongkok bukanlah hal yang mustahil. Didukung dengan populasi yang mencapai 1.3 milyar<sup>1</sup>, Tiongkok telah menjadi pemain penting dan memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian global.

Meskipun masih memiliki tingkat pertumbuhan yang aman, pemerintah Tiongkok sadar bahwa laju industrialisasi terutama di daerah pesisir negara tidak akan terus bertahan. Pemakaian energi yang berlebihan, sumber daya yang semakin menipis, ketimpangan sosial dan pendapatan, serta urbanisasi yang berlangsung terlalu cepat, menjadi beberapa permasalahan utama yang dihadapi

---

<sup>1</sup> China. World Bank. <http://data.worldbank.org/country/china> diakses 17 Desember 2016

oleh pemerintah Tiongkok. Permasalahan ini muncul dari reformasi ekonomi yang tidak sempurna. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan yang signifikan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata dapat dicapai.. Pemerintahan pada masa Hu Jintao menyadari permasalahan ini dan bereaksi dengan mengeluarkan Rencana-Lima Tahun Tiongkok yang kedua belas (periode 2011-2015). Rencana ini menyoroti pengembangan layanan dan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan lingkungan dan sosial. Target pertumbuhan tahunan yang tertera dalam rencana tersebut yaitu sebesar 7 persen memperlihatkan niat pemerintah untuk fokus pada kualitas hidup masyarakat.<sup>2</sup> Pemerintahan Xi Jinping yang dimulai pada tahun 2013 menjadi eksekutor dari Rencana-Lima Tahun Tiongkok yang kedua belas. Xi Jinping kemudian menyusun strategi perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan energi untuk menjaga laju serta memperluas industrialisasi menjadi strategi pertama. Strategi kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rural dan tertinggal terutama wilayah barat. Dengan memenuhi kebutuhan energi maka Tiongkok dapat memperluas industrinya hingga ke wilayah barat sehingga perekonomian wilayah tersebut akan berkembang. Dengan berkembangnya perekonomian wilayah barat maka pendapatan nasional pun akan meningkat, daerah pesisir tidak lagi menjadi tumpuan perekonomian nasional.

---

<sup>2</sup> KPMG Advisory . *China's 12<sup>th</sup> Five-Year Plan: Overview*, KPMG Tiongkok, 2011, Hal., 1.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dalam sub-bab ini akan dijabarkan deskripsi masalah, beserta dengan pembatasan dan perumusannya.

### 1.2.1. Deskripsi Masalah

Tiongkok telah membuat perubahan ekonomi yang baik dan dapat mengurangi kemiskinan dengan mengangkat lebih dari 500 juta masyarakatnya dari kemiskinan selama tiga dekade terakhir.<sup>3</sup> Pengembangan kualitas masyarakat yang semakin membaik berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama lima tahun belakangan ini. Data bank dunia menunjukkan adanya penurunan GDP Tiongkok sejak tahun 2011. Pada tahun 2010 Tiongkok memiliki tingkat pertumbuhan GDP sebesar 10.6 persen persen yang kemudian terus mengalami penurunan menjadi 9.5 persen pada tahun 2011, 7.8 persen di tahun 2012, 7.7 persen di tahun 2013, dan 7.3 persen di tahun 2014.<sup>4</sup> Selain itu, akibat laju pertumbuhan yang cepat di daerah pesisir, beberapa daerah lain mengalami ketertinggalan terutama daerah-daerah di wilayah barat Tiongkok. Ketimpangan ekonomi dan sosial menyebabkan adanya mosi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang berujung pada konflik dan gerakan separatis.

---

<sup>3</sup> KPMG, *Op.cit.*

<sup>4</sup> World Bank. *GDP Growth (annual%)*. Data.worldbank.org. 2015.

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1> diakses 17 Desember 2016

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini Xi Jinping menginisiatifkan adanya reformasi. Strategi dari reformasi ini sendiri dapat dilihat dari keputusan rapat plenum yang diadakan oleh partai komunis Tiongkok tahun 2013. Secara jelas dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih menjadi tujuan utama dari Tiongkok. Reformasi dan kebijakan ekonomi Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping dapat dilihat dalam inovasi *macro-control* yang bertujuan untuk menentukan tingkat dan wewenang manajemen ekonomi yang wajar bagi pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah menetapkan sasaran tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan, tingkat penyerapan tenaga kerja. Langkah-langkah ini dianggap perlu diterapkan secara paralel dan esensial terhadap upaya pemerintah untuk mempertahankan laju industrialisasi, menyempurnakan transisi ke sistem ekonomi bebaris pasar serta mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Inovasi *macro-control* ini menunjukkan pemerintah masih menjadi aktor utama dalam perekonomian Tiongkok.<sup>5</sup>

Lebih jauh lagi, Xi Jinping kemudian menginisiatifkan untuk bersama membangun Jalur Sutera Maritim dalam kunjungannya ke Kazakhstan dan Indonesia pada bulan Oktober tahun 2013. Inisiatif ini merupakan bagian dari *Silk Road Economic Belt* dan *21-st Century Maritime Silk Road* yang kemudian dikenal dengan nama *One Belt One Road* (OBOR). Prioritas dari perencanaan ini sendiri memiliki 4 poin utama yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, dan integrasi finansial. Investasi dan kerjasama perdagangan menjadi salah satu tugas utama dalam membangun Jalur Sutera

---

<sup>5</sup> Osamu Tanaka, *Economic Reform and Economic Policy of the Xi Jinping Leadership*. Policy Research Institute, 2015. Hal., 1.

Maritim. Inisiatif ini diadakan untuk meningkatkan investasi dan fasilitasi perdagangan dengan menghapus hambatan investasi dan perdagangan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat di kawasan dan semua negara terkait.<sup>6</sup>

Jalur Sutra Maritim memiliki arti penting bagi pemerintah Tiongkok yaitu untuk mempermudah perpindahan barang dan jasa. Melalui Jalur Sutra Maritim, Tiongkok mengimplementasikan penyederhanaan investasi dan aktivitas perdagangan ekspor impor serta membangun sistem baru bagi perekonomian terbuka. Pengembangan struktur sistem baru ini akan mendukung perpindahan komoditas yang sangat diminati Tiongkok yaitu energi, terutama pasokan yang andal dan tidak terganggu maupun terpengaruh oleh keadaan politik. Hal ini sejalan dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional serta membuka akses di perbatasan wilayah barat untuk mendorong perekonomian wilayah tersebut. Kepemimpinan politik yang kuat dari Presiden Xi Jinping untuk melaksanakan reformasi sistem ekonomi yang drastis sekaligus mengontrol kelompok kepentingan yang tidak menginginkan reformasi sangat diperlukan. Namun satu hal yang harus dibahas terlebih dahulu adalah bagaimana Jalur Sutra Maritim ini dapat memenuhi strategi besar Xi Jinping untuk mereformasi ekonomi Tiongkok.

---

<sup>6</sup> National Development and Reform Commission, *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21<sup>st</sup> – Century Maritime Silk Road*, 2015.  
[http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\\_669367.html](http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html) diakses tanggal 17 Desember 2016

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan berpusat kepada strategi ekonomi Tiongkok yang dibagi dalam 3 periode yaitu periode revolusi, reformasi dan keterbukaan serta periode paska reformasi. Periode paska reformasi digambarkan melalui strategi ekonomi masa Xi Jinping dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi strategi tersebut melalui Jalur Sutera Maritim. Jangka waktu penelitian adalah sejak tahun 1949 hingga tahun 2015. Tahun 1949 dipilih sebagai batas awal sebab pada tahun tersebut industrialisasi Tiongkok dimulai. Sementara tahun 2015 menjadi batas akhir penelitian dikarenakan tahun tersebut menjadi batas akhir periode Rencana Lima Tahun Tiongkok yang kedua belas yang menjadi dasar dari strategi ekonomi pemerintahan Xi Jinping.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah berikut, bagaimana inisiatif Jalur Sutera Maritim dapat memenuhi strategi Ekonomi Xi Jinping?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Jalur Sutera Maritim dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi strategi ekonomi Xi Jinping. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ataupun peneliti yang membahas permasalahan ekonomi di Tiongkok, terutama mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping

untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dan strategi ekonomi Xi Jinping, ataupun Jalur Sutra Maritim.

#### **1.4. Kajian Literatur**

Kajian literatur akan digunakan dalam penelitian ini untuk membantu penelitian yang dilakukan. Beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian antara lain 1) dokumen KPMG Tiongkok mengenai Rencana-Lima Tahun kedua belas, 2) hasil riset Osamu Tanaka terkait kebijakan ekonomi kepemimpinan Xi Jinping, 3) dokumen internal *Silk Road Forum 2015* yang ditulis oleh John Wong, 4) serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Luar Negeri, dan Departemen Perdagangan Tiongkok tahun 2015.

Dokumen yang dikerluarkan oleh KPMG Tiongkok dengan judul *China's 12<sup>th</sup> Five-Year Plan: Overview* pada bulan Maret tahun 2011 berisikan tinjauan Rencana-Lima Tahun Tiongkok secara luas. Dokumen ini menunjukkan garis besar rencana dan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok. Termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat serta tema-tema utama yang dijadikan fokus dalam rencana periode tersebut. Dokumen ini juga diperkaya dengan tingkat konsumsi dan ekspor, daftar industri prioritas, dan target kunci dari bidang ekonomi dan non ekonomi. Dokumen ini

membenarkan bahwa pertumbuhan pesat yang dialami Tiongkok memiliki sisi positif dan juga negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial nasional.<sup>7</sup>

Hasil riset Osamu Tanaka yang berjudul *Economic Reform and Economic Policy of the Xi Jinping Leadership* merupakan bagian dari laporan *Policy Research Institute*, Kementerian Keuangan Jepang, dalam tinjauan kebijakan publiknya volum kesebelas, nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2015. Dalam riset ini Osamu Tanaka membagi reformasi dan kebijakan ekonomi pemerintahan Xi Jinping ke dalam 3 isu yaitu tentang memperdalam reformasi secara komprehensif, tipe urbanisasi baru, dan inovasi makro-kontrol. Menurut Tanaka, ketiga isu tersebut harus diimplementasikan secara paralel untuk menyelamatkan perekonomian Tiongkok dari *middle-income trap* serta membantu transisi ke sistem ekonomi yang baru. Laporan hasil riset ini menekankan pada karakteristik reformasi dan kebijakan ekonomi pemerintahan Xi Jinping dengan fokus terhadap reformasi sistem ekonomi, urbanisasi, makro-kontrol, penyesuaian ekonomi struktural, berdasarkan data-data yang diperoleh dari konferensi-konferensi penting dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang.<sup>8</sup>

Dokumen internal forum Silk Road tahun 2015 ditulis oleh John Wong dengan judul *China's "One Belt, One Road" Initiative: Economic Diplomacy with Chinese Characteristics*. Menurut John Wong hal ini dikarenakan kurangnya strategi berbasis *soft power* dari pihak Tiongkok. Inisiatif Jalur Sutera sendiri

---

<sup>7</sup> KPMG, *Op. Cit.* Hal., 1-4.

<sup>8</sup> Osamu Tanaka, *Op. Cit.* Hal., 1-2.

dianggap sebagai sebagai titik awal diplomasi ekonomi Tiongkok dengan implikasi jangka panjang yang positif baik bagi Tiongkok maupun bagi negara-negara terkait. Wong berargumentasi bahwa pemerintah Tiongkok saat ini sedang dalam tahap “*cash rich*” dan oleh karenanya mampu mengadakan diplomasi ekonomi dengan adanya kekuatan keuangan yang datang dari *twin-surplus*<sup>9</sup> didukung juga dengan fakta bahwa Tiongkok memiliki cadangan asing mencapai 4 triliun dolar serta memiliki neraca fiskal yang sehat.<sup>10</sup> Hal ini tentunya mendukung inisiatif Jalur Sutera Maritim yang membutuhkan pendanaan besar untuk membangun infrastruktur. Inisiatif *One Belt, One Road* dianggap memiliki fondasi yang kuat dengan dibentuknya Asian Infrastructure Investment Bank yang memiliki dana sebesar 50 milyar dolar AS sebagai modal awalnya. Dengan tujuan untuk memberikan konektivitas yang dibutuhkan, Wong berargumentasi bahwa skema ini pada akhirnya akan mengintegrasikan berbagai bagian Asia sebagai satu kesatuan ekonomi yang begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi atau bahkan mengubah pola geo-politik dan geo-ekonomi regional dan juga global.<sup>11</sup>

Literatur kelima adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh NDRC bersama Kementerian Luar negeri dan Departemen Perdagangan Tiongkok dengan otoritas Dewan Negara pada bulan Maret tahun 2015. Dokumen berjudul *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21<sup>st</sup> – Century Maritime Silk Road* ini menjadi dokumen yang dapat menjelaskan cetak

---

<sup>9</sup> Twin surplus pemerintah Tiongkok diperoleh dari surplus perdagangan dan surplus akun kapita atau *capita account surplus*.

<sup>10</sup> John Wong, *China's “One Belt, One Road” Initiative: Economic Diplomacy with Chinese Characteristics*, Internal Document for Silk Road Forum, 2015, hal., 1-2

<sup>11</sup> *Loc.cit.*

biru dari inisiatif OBOR. Dokumen ini berisikan latar belakang, prinsip-prinsip, kerangka kerja, bidang-bidang yang menjadi prioritas kerjasama, dan mekanisme kerjasama. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa koordinasi kebijaksanaan merupakan kunci utama dalam pengimplementasian inisiatif ini. Sedangkan pembangunan dan pembentukan jaringan infrastruktur serta pembentukan sistem standard teknis merupakan area prioritas. Selain itu ditekankan pula pentingnya kerjasama dalam konektivitas infrastruktur energi.<sup>12</sup>

Kerjasama dalam investasi dan perdagangan yang bebas hambatan menjadi tugas utama yang dibebankan dalam inisiatif ini. Hal ini menunjukkan bagaimana inisiatif OBOR juga ditujukan untuk pencapaian liberalisasi perdagangan dan memudahkan negosiasi kesepakatan investasi dan perdagangan bilateral maupun multilateral bagi Tiongkok. Kemudian untuk memantapkan fondasi inisiatif ini dijelaskan bahwa kerjasama dan integrasi finansial merupakan langkah penting yang perlu diambil. Lebih lanjut dijelaskan bagaimana *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* memiliki peran penting dalam mengawali upaya bersama dari negara-negara terkait. Disebutkan pula bahwa *BRICS New Development Bank* akan ikut ambil bagian dalam inisiatif ini. Dokumen ini juga menunjukkan keinginan Tiongkok dalam melakukan negosiasi antara pihak-pihak terkait dalam mendirikan lembaga pembiayaan dari Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dan mengatur serta memulai operasi *Silk Road Fund* sesegera mungkin. Melalui inisiatif ini, Tiongkok berusaha untuk membawa visi baru bagi perekonomian

---

<sup>12</sup> NDCR, *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21<sup>st</sup> – Century Maritime Silk Road*, en.ndcr.gov.cn, 2015.

global yang sekiranya dapat mengakomodasi aspirasi dan memberi keuntungan bagi semua negara sepanjang jalur sutera ini.<sup>13</sup>

Dari kelima literatur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana Jalur Sutera Maritim dapat memenuhi strategi ekonomi Xi Jinping terutama dalam hal pemerataan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan tiga teori dalam analisis masalah yaitu teori *developmental state*, teori *energy security*, dan dan teori politik luar negeri. Adapun sumber-sumber yang akan digunakan adalah 1) *The Developmental State: Odyssey of a Concept* oleh Chalmers Johnson, 2) *China as a Developmental State* oleh Andrej Bolesta, 3) *The Economic Theory of Developmental Theory* oleh Ha Joon-Chang, 4) jurnal Perry Sadorsky mengenai pengaruh urbanisasi dan industrialisasi terhadap intensitas energi di negara berkembang, 5) jurnal Mikkal E. Herberg menenai *energy insecurity* di Asia, 6) jurnal Paul H. Templet yang berisi analisis empiris tentang energi, keberagaman dan pembangunan ekonomi, 7) buku Carlos Pascual dan Jonathan Elkind tentang *energy insecurity*, 8) *Understanding Foreign Policy Decision Making* oleh Alex Mintz dan Karl DeRoeuen mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam politik luar negeri, 9) *Negotiation and Foreign Policy Making* oleh Melania-Gabriela Ciot mengenai level analisis dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar

---

<sup>13</sup> NDCR *Loc.cit.*

negeri, 10) *Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations* oleh James D. Fearon yang menjelaskan bahwa politik domestic suatu negara memiliki keterkaitan dengan kebijakan luar negerinya.

Teori *developmental state* berakar dari merkantilisme yang mendukung adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Fokus dari teori ini adalah peran pemerintah dalam pengaturan dan pencapaian tujuan-tujuan social, birokrasi pemerintah yang komparatif, dan kerjasama antara pihak public dan swasta. Kebanyakan negara *developmental* menggunakan sistem *state guided* dimana negara menjadi aktor utama dalam koordinasi ekonomi.<sup>14</sup> Teori ini secara konseptual seringkali diposisikan di antara sistem ekonomi pasar bebas kapitalis dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Konsep ini dianggap sebagai sistem perencanaan-rasional kapitalis (Johnson 1999). Meski teori ini mendukung intervensi pemerintah di atas pasar terbuka liberal, (Johnson 1999) kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bukanlah pengganti sistem pasar merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempengaruhi perilaku produsen, konsumen, dan investor. Berbeda dengan *state control* negara *developmental* tidak meniadakan kepemilikan swasta, organisasi buruh swasta, maupun manajemen swasta. Johnson menjelaskan bahwa teori ini menekankan hubungan mutualisme antara pihak publik dan swasta.<sup>15</sup>

Andrzej Bolesta menyebutkan 4 karakteristik *developmental state*. Pertama, Tujuan utama dari negara *developmental* adalah pembangunan ekonomi. Kedua,

---

<sup>14</sup> Chalmers Johnson, *The Developmental State: Odyssey of a Concept*, Cornell University Press, 1999. Halaman 35

<sup>15</sup> Chalmers Johnson., *Ibid.* Halaman 34

tujuan negara ini dicapai melalui industrialisasi. Ketiga strategi dan tujuan disusun oleh pemerintah. Keempat, proses pembangunan ini berada di situasi dimana negara mengatur tidak hanya peraturan social, politik, dan ekonomi namun juga arah dari pembangunan. Tujuan utama dari negara *developmental* adalah pembangunan ekonomi. Seperti yang dikutip oleh Bolesta, Ha Joon-Chang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan negara yang dapat membuat dan meregulasi hubungan ekonomi dan politik untuk mendukung keberlanjutan industrialisasi. Teori *Developmental State* beranggapan bahwa sulit bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ekstensif apabila pemerintah memiliki kekuatan yang terbatas untuk mengarahkan aktor-aktor ekonomi untuk mengikuti strategi keseluruhan.<sup>16</sup>

Chang mengemukakan empat fungsi pemerintah dalam *developmental state* 1) koordinasi untuk perubahan, 2) penentu visi, 3) pembangun lembaga, 4) manajemen konflik. Dalam fungsinya sebagai coordinator perubahan pemerintah bertugas mengarahkan investasi yang berkaitan satu dengan yang lain (*complimentary investment*). Fungsi kedua adalah ketika sebagai representasi dari masyarakat, pemerintah dapat menyusun visi bagi masa perekonomian sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembangun institusi berarti pemerintah menjalankan fungsinya sebagai institusi yang dapat menjadi “kendaraan” bagi visi yang sudah ditentukan dan mewujudkannya. Fungsi keempat berkaitan dengan konflik yang pasti akan dibawa oleh perubahan. Dalam *developmental state* pemerintah dapat membantu melancarkan kesepakatan dan memastikan pihak

---

<sup>16</sup> Andrzej Bolesta, *China as a Developmental State*, Montenegrin Journal of Economics, 2007.  
Halaman 106

yang kalah akan menerima dan menyesuaikan diri dan yang menang menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Perry Sadorsky menitikberatkan tulisannya terhadap pengaruh urbanisasi dan industrialisasi terhadap intensitas penggunaan energi. Isu-isu seperti perubahan iklim, keterbatasan minyak, serta permasalahan *energy insecurities* mendorong munculnya cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menyadari bahwa intensitas penggunaan energi tidak dari permasalahan tersebut maka Sadorsky mencoba untuk melihat apakah intensitas energi dipengaruhi urbanisasi dan industrialisasi. Industrialisasi memunculkan adanya aktivitas industri yang secara umum menggunakan energi lebih banyak daripada aktivitas produksi tradisional seperti agrikultur dan manufaktur. Disimpulkan bahwa apabila suatu negara meningkatkan aktivitas industrinya maka semakin tinggi pula kebutuhan energi negara tersebut (Sadorsky 2013). Semakin tinggi aktivitas industri suatu negara maka dapat diasumsikan semakin besar pula pendapatannya. Seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional suatu negara maka semakin efisien pula penggunaan energi negara tersebut. Dalam jangka panjang peningkatan 1% pada pendapatan akan mengurangi intensitas energi sebanyak -0.45% hingga -0.35%<sup>18</sup>.

Dalam tulisannya Mikkal E. Herberg mencoba untuk menentukan apakah *energy insecurities* di Asia akan mendorong adanya konflik atau kerjasama. Kebutuhan energi di Asia semakin meningkat. Ketergantungan Asia terhadap

---

<sup>17</sup> Ha Joon-Chang. *The Economic Theory of Developmental State*. dalam *The Developmental State* oleh Meredith Woo-Cummings. California. Cornwell University Press. 1999

<sup>18</sup> Perry Sadorsky. *Do urbanization and Industrialization affect energy intensity in developing countries?*. Energy Economics. Online Edition, No 37. 2013. Halaman 52-59  
[www.elsevier.com/eneco](http://www.elsevier.com/eneco)

impor energi juga diprediksi akan terus meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya *energy insecurities* yang dirasakan oleh negara-negara Asia. Negara-negara tersebut akan mencoba untuk mengamankan sumber-sumber energi demi masa depan mereka. Ditambah lagi dengan masih lambatnya reformasi industri energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kebutuhan energi dianggap memiliki potensi untuk mendorong adanya kerjasama regional (Herberg 2005). Adanya jalur-jalur pipa energi dilihat sebagai cara beberapa negara untuk mengatasi keterbatasan energi dan juga mendorong adanya kerjasama regional meski kebutuhan energi tidak selalu berakhir dengan kerjasama. Titik sumbatan energi Asia seperti di Terusan Homuraz, Teluk Persia, dan Terusan Malaka mengakibatkan ketegangan dan dilihat sebagai potensi konflik. Meski demikian demi alasan yang sama, beberapa negara-negara Asia telah bekerja sama untuk menemukan celah baru.<sup>19</sup>

Paul H. Templet berpendapat bahwa penggunaan energi meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi yang baru, dengan demikian jalur aliran energi yang baru juga terbuka. Keberagaman ekonomi yang diakibatkan oleh terbukanya sektor-sektor baru yang membutuhkan energi menyebabkan kebutuhan energi meningkat. Mendukung argumen Sadorsky, Templet berpendapat bahwa semakin tinggi keberagaman ekonomi maka semakin tinggi pula efisiensi penggunaan energi suatu negara. Dua strategi berbeda yang sering digunakan dalam pembangunan berkaitan dengan energi adalah, pertama dengan mendorong penggunaan energi dan kedua menekankan pada peningkatan keberagaman

---

<sup>19</sup> Mikkal E. Herberg, *Asia's Energy Insecurity: Cooperation or Conflict*. Strategic Asia. 2004-2005. Halaman 339 - 372

(Templet 1999). Beberapa negara meleburkan kedua strategi ini dan menggunakannya sebagai strategi ketiga. Negara-negara berkembang umumnya bergantung pada peningkatan penggunaan energi untuk meningkatkan output produksi. Sementara negara-negara maju menggunakan strategi keberagaman untuk meningkatkan output produksi. Pada akhirnya setiap negara pasti mencoba untuk mencapai keberagaman ekonomi yang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin beragam ekonomi suatu negara maka semakin efisien input energinya dan intensitas penggunaan energi semakin sedikit pula.

Dalam bukunya *Energy Security* Pascual dan Elkind mengemukakan empat elemen dalam keamanan energi atau yang mereka asosiasi kan pula dengan independensi energi. Keempat elemen tersebut adalah elemen-elemen tradisional seperti *availability* (ketersediaan), *reability* (keandalan), *affordability* (keterjangkauan), serta satu elemen baru yaitu *sustainability* (keberlanjutan). Elemen ketersediaan tidak hanya mengacu pada ketersediaan sumber energi namun juga pada kemampuan produsen, negara transit, dan konsumen untuk menyepakati adanya hubungan dagang satu dengan yang lain. Investasi modal menjadi komponen yang dapat mendukung elemen ketersediaan. Elemen keandalan berhubungan dengan rantai distribusi energi. Rantai nilai yang kuat dan beragam, kapasitas cadangan energi yang cukup, serta perlindungan sistem energi dari ancaman dari hal-hal tidak terduga seperti cuaca maupun hal terduga seperti serangan teroris atau pengaruh politik menjadi komponen-komponen yang mempengaruhi elemen ini. Elemen keterjangkauan berhubungan dengan sistem

harga energi dimana energi transparansi, harga yang murah, dan ekspektasi realistis menjadi beberapa komponen yang mempengaruhinya. Elemen keberlanjutan berhubungan seringkali diasosiasikan dengan *green energy* dimana energi yang dipakai berasal dari sumber yang mudah terbaharukan. Kadar emisi yang rendah, kontribusi negatif yang rendah terhadap lingkungan, serta proteksi sistem energi terhadap perubahan iklim menjadi komponen yang mempengaruhi.

Dalam bukunya *Understanding Foreign Policy*, Mintz dan DeRoeuen menyatakan bahwa dalam politik luar negeri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. Selain 3 kelompok faktor tradisional yaitu faktor internasional, faktor domestik dan faktor budaya,<sup>20</sup> Mintz dan DeRoeuen berpendapat bahwa psikologi juga dapat memberikan pengaruh. Terdapat 8 faktor dalam bidang psikologi yang mempengaruhi keputusan luar negeri,<sup>21</sup> 4 diantaranya dapat dikatakan relevan dengan penelitian ini. Keempat faktor tersebut adalah set yang telah timbul (*evoked set*), sistem dan skema kepercayaan (*beliefs systems and schema*), analogi dan pembelajaran (*analogies and learning*), serta gaya kepemimpinan (*leadership style*).<sup>22</sup>

Pertama, set yang timbul merujuk pada kepentingan utama yang memerlukan perhatian (*immediate concerns*) yang ada di dalam pemikiran pengambil

---

<sup>20</sup> Alex Mintz dan Karl DeRoeuen. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York. Cambridge. University Press. 2010. 121

<sup>21</sup> Antara lain konsistensi kognitif, set yang telah timbul, emosi, gambaran/stereotip, sistem dan skema kepercayaan, analogi dan pembelajaran, kepribadian pemimpin, gaya kepemimpinan.

<sup>22</sup> *Ibid.* Mintz dan DeRoeuen. Halaman 98

keputusan (Yergin dalam Mintz dan DeRoeuen 2010, 99).<sup>23</sup> Di tengah banyaknya peristiwa-peristiwa internasional yang terjadi setiap harinya, memahami *evoked set* dari pengambil keputusan akan membantu dalam memperkirakan dan memahami keputusan yang akan di ambil.<sup>24</sup> Kedua, kepercayaan dianggap memberikan pengaruh yang kuat bagi pengambilan keputusan dengan memberikan kerangka untuk menafsirkan dan memahami situasi pengambilan keputusan (Renshon dan Renshon dalam Mintz dan DeRoeuen 2010, 101). Dengan kata lain pengaruh faktor domestik dan internasional dalam pengambilan keputusan “tersaring” melalui kepercayaan dan sistem pemimpin. Ketiga, analogi dan pembelajaran merujuk pada prosesi informasi yang menggunakan pengalaman dan kejadian-kejadian masa lampau sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bagi sebelum mengambil keputusan.<sup>25</sup> Hal ini disebut sebagai *analogi*. Dalam konteks Tiongkok, pemerintahan Tiongkok berusaha untuk belajar dari pengalaman masa lalu terutama kegagalan yang dirasakan pada masa revolusi. Perencanaan ekonomi pada masa revolusi yang dianggap kurang matang serta mengakibatkan kelaparan dan kesengsaraan rakyat menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Pemerintah kemudian mulai berhati-hati dalam membentuk perencanaan jangka panjang (perencanaan lima tahun). Faktor keempat adalah gaya kepemimpinan. Menganalisa gaya kepemimpinan akan membantu kita mengerti mengapa suatu keputusan atau kebijakan diambil oleh pemimpin dan mengapa pilihan lainnya tidak. Tidak hanya itu menganalisa gaya kepemimpinan juga

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Mintz dan DeRoeuen. Halaman 101

<sup>24</sup> *Ibid.* Mintz dan DeRoeuen. Halaman 99

<sup>25</sup> *Ibid.* Mintz dan DeRoeuen. Halaman 103

membantu dalam memahami proses pengambilan keputusan itu sendiri. Gaya kepemimpinan masing-masing preseiden Tiongkok memperlihatkan hasil yang berbeda, sebagai contoh kepemimpinan Mao Zedong yang sangat nasional ditunjukkan dengan kebijakan pintu tertutupnya. Sementara Deng Xioping yang lebih moderat dan percaya bahwa Tiongkok dapat meningkatkan perekonomian dengan belajar dari negara-negara barat ditunjukkan dengan kebijakan pintu terbukanya. Pada masa Xi Jinping kebijakan luar negeri yang dikeluarkan bersifat “bersahabat” terhadap negara-negara lain.<sup>26</sup>

Dalam tulisannya Melania-Gabriela Ciot menjelaskan bahwa dalam menganalisis kebijakan luar negeri unit analisis yang digunakan berbeda dengan ketika menganalisis hubungan internasional. Bila hubungan internasional menggunakan unit analisis individu, negara, dan sistem, maka analisis pengambilan keputusan luar negeri menggunakan unit yang memutuskan kebijakan tersebut yaitu pemimpin, kelompok dan kolisi. Ciot menyebutkan 3 level analisis terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Level analisis tersebut adalah individual, grup dan koalisi. Analisis pada level individu melihat bahwa kebijakan-kebijakan muncul ketika pemimpin memiliki surplus kekuatan dalam negara. Ciot menggaris bawahi bahwa pemimpin yang kuat tidak mencari konsensus. Contoh yang diberikan antara lain Fidel Castro di Kuba, Stalin di Uni Soviet, dan dalam konteks Tiongkok adalah Mao Tse-tung (Mao Zedong).<sup>27</sup> Mao cukup memiliki pengaruh yang kuat dalam pengabilan keputusan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Mintz dan DeRoeuen. Halaman 115

<sup>27</sup> Melania-Gabiela Ciot. *“Negotiation and Foreign Policy Decision Making”*. Cambridge Scolars Publishing. 2014.

kebijakan luar negeri Tiongkok. Xi Jinping mungkin tidak memiliki kekuatan politik sebesar Mao namun ia memiliki dukungan yang besar dari tokoh-tokoh politik terdahulu serta pengikut mereka dalam partai komunis nasional Tiongkok. Hal ini tentu sedikit banyak berpengaruh pada pengambilan keputusan luar negeri Tiongkok.

Dalam tulisannya, James D. Fearon menjelaskan bahwa politik domestik suatu negara adalah bagian penting dalam analisis kebijakan luar negerinya. Menurut Fearon, politik domestik memiliki peran penting dalam membentuk dan menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara meski tentu saja “peran penting” ini memiliki level yang berbeda, tergantung teori hubungan internasional mana yang digunakan. Namun yang pasti, interaksi domestik menjadi salah satu faktor dalam pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>28</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Berikut adalah metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dimana penelitian menghasilkan narasi atau deskripsi secara tekstual dari fenomena yang diteliti.<sup>29</sup> Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif

---

<sup>28</sup> James D. Fearon. “*Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations.*” Annual Reviews. www. AnnualReview.com diakses tanggal 10 July 2017

<sup>29</sup> Scott W. VanderStoep, Deirdre J. Johnston, *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*, John Wiley & Sons, 2009. Hal., 7

merupakan penggambaran perilaku, pikiran, atau perasaan kelompok tertentu. Jenis penelitian ini mengambil hubungan antara perilaku aktor yang diteliti dengan variabel lain yang digunakan untuk memeriksa atau menjelaskan penyebab suatu perilaku atau peristiwa secara sistematis serta menunjukkan dan menggambarkan fenomena yang ada.<sup>30</sup>

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, dimana data dikumpulkan dengan mencari atau menggunakan buku-buku, literatur-literatur, dan catatan-catatan serta laporan-laporan yang tersedia dan sekiranya relevan dengan kejadian yang akan diteliti.<sup>31</sup> Data yang diambil untuk melakukan penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen yang merupakan data primer. Artikel-artikel dari media yang dipublikasikan secara *online* juga akan menjadi sumber data berupa data sekunder dari penelitian ini.

## **1.7. Sistematika Penyajian**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut, dimana Bab I merupakan latar belakang dan identifikasi dari masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Jalur Sutera Maritim dan bagaimana inisiatif ini memenuhi

---

<sup>30</sup> Mark.R Leary, *Introduction to Behavioral Research Methods*, Allyn & Bacon, 2001. Hal., 23

<sup>31</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988, Hal., 111

strategi ekonomi pemerintahan Xi Jinping yang meliputi kebutuhan pasokan energi yang andal untuk menjaga keberlangsungan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi di wilayah timur. Disaat yang sama energi tersebut juga digunakan untuk memperluas industri ke daerah barat sehingga perekonomian wilayah tersebut semakin maju. Dengan meningkatnya perekonomian daerah barat maka dapat dipastikan adanya pemerataan pembangunan .

Selanjutnya Bab II akan membahas strategi ekonomi Tiongkok pada masa revolusi (awal industrialisasi Tiongkok), masa reformasi, serta masa paska reformasi. Termasuk di dalam strategi paska reformasi adalah strategi ekonomi pada masa Xi Jinping yang memiliki fokus pada pemerataan pembangunan terutama dengan meningkatkan perekonomian wilayah barat. Kemudian dalam Bab III inisiatif Jalur Sutra Maritim akan dibahas termasuk cetak biru, mekanisme kerjasama, dan progres inisiatif.

Bab IV akan membahas Jalur Sutra Maritim sebagai upaya pemenuhan strategi ekonomi Xi Jinping yaitu sebagai salah satu cara untuk mengamankan pasokan energi dari Timur Tengah dan untuk membangkitkan serta mengembangkan perekonomian wilayah barat. Sedangkan Bab V merupakan penutup berupa kesimpulan dari penulis mengenai penelitian ini.